

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEWENANGAN DKPP DALAM  
PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PEMILIHAN UMUM**

**(Studi Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**DEWI ANI SAURROHMAH**

**NIM. C95215049**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2019**

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Ani Saurrohmah  
NIM : C95215049  
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/  
Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan DKPP  
dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik  
Pemilihan Umum (Studi Putusan DKPP Nomor  
23-25/DKPP-PKE-I/2012).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 April 2019

Saya yang menyatakan,



Dewi Ani Saurrohmah

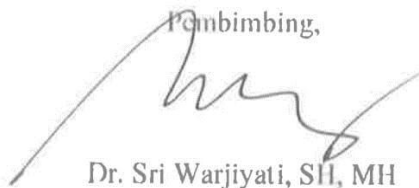
NIM. C95215049

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ani Saurrohmah C95215049 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Maret 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Sri Warjiyati', written over a horizontal line.

Dr. Sri Warjiyati, SH, MH

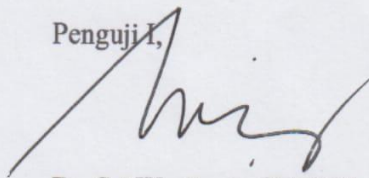
NIP. 196808262005012001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ani Saurrohmah NIM. C95215049 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

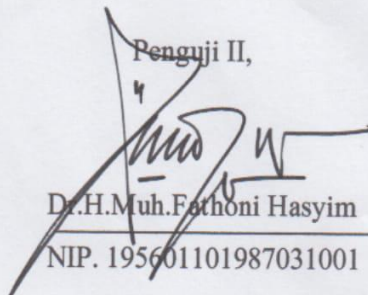
### Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,



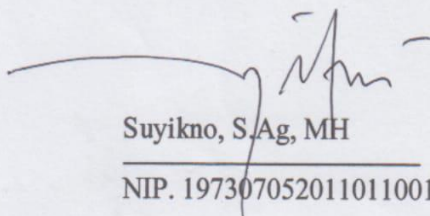
Dr. Sri Warjiyati, SH, MH  
NIP. 196808262005012001

Penguji II,



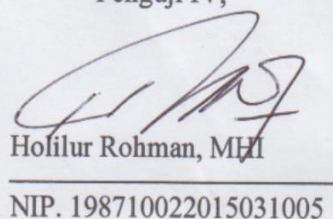
Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim  
NIP. 195601101987031001

Penguji III,



Suyikno, S.Ag, MH  
NIP. 197307052011011001

Penguji IV,



Hafilur Rohman, MH  
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 11 April 2019

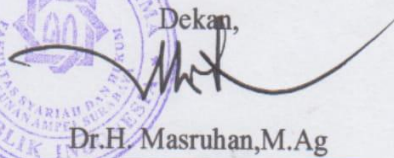
Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTRIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dewi Ani Saurrohmah  
NIM : C95215049  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam  
E-mail : [dewiani1998@gmail.com](mailto:dewiani1998@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi      ☐ Tesis      ☐ Disertasi      ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEWENANGAN DKPP DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 23-25/DKPP- PKE-I/2012).**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 April 2019

Penulis

Dewi Ani Saurrohmah  
NIM. C95215049



## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan DKPP Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum (Studi Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-1/ 2012)” ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, pertama menjawab pertanyaan tentang bagaimana kewenangan DKPP dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik pemilihan umum dalam Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012. Kedua, Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam Putusan DKPP Nomor 23-25/ DKPP-PKE-I/ 2012.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang membahas mengenai pokok permasalahan. Analisis yang digunakan dengan metode deskriptif analisis yaitu suatu cara dengan menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas untuk menjaga kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu. Namun, faktanya DKPP mengeluarkan putusan di luar batas kewenangannya, seperti dalam Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012, putusan DKPP ini dianggap melampaui batas kewenangannya karena memerintahkan KPU untuk mengikuskertakan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi dalam verifikasi faktual. Perintah untuk mengikuskertakan ini sebagai bentuk intervensi DKPP terhadap tahapan pemilu, dalam hal ini DKPP tidak memiliki hak untuk ikut serta masuk dalam ranah ini. Sedangkan dalam konteks *fiqh siyasah* kewenangan DKPP ini hampir sama dengan *wilāyat al- hisbah*, kedua lembaga ini sama-sama memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral perseorangan, perbedaannya adalah ruang lingkup kewenangan *wilayat al-hisbah* yang lebih luas.

Sejalan dengan hasil penelitian skripsi ini, sebaiknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali ke khittahnya sebagai instiusi peradilan etik Pemilu yang menjaga kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undag Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sehingga untuk kedepannya DKPP tidak lagi mengeluarkan putusan yang melampaui batas kewenangannya. DKPP sebaiknya cukuplah berhenti pada ranah menjatuhkan sanksi bagi komisioner penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik.









Penyelenggaraan Pemilu umumnya di lakukan oleh KPU dan pengawasannya di lakukan oleh Bawaslu. Dengan demikian, muncul pertanyaan apabila ada pelanggaran yang di lakukan oleh kedua lembaga tersebut nantinya siapakah yang dapat menindaklanjutinya. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka di bentuklah lembaga baru yang bersifat independen dan terbuka, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

DKPP mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan dalam dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, melaksanakan verifikasi laporan administrasi dalam pemeriksaan formil, dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan dan/atau laporan, dan secara materiil dalam pemeriksaan yang di indikasikan pelanggaran kode etik anggota penyelenggara Pemilu. Lebih lanjut dari pengaduan dan/atau laporan oleh penyelenggara Pemilu, menetapkan putusan dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat luas.

[illegible]





Menurut pendapat Yusril Ihza Mahendra seorang pakar hukum tata negara, Wewenang DKPP hanya memberikan sanksi kepada penyelenggaraan pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Boleh memecat. Hanya itu, tidak lebih. Badan ini tidak bisa membatalkan keputusan KPU/KPUD. Karena DKPP bukan lembaga peradilan. DKPP hanya Dewan Kehormatan. Hanya mengurus soal etik, bukan soal hukum.

Dalam hukum Islam, keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini bisa dikaji ke ranah *fiqh siyāsah* yakni dengan meninjau dari tugas dan wewenangnya DKPP, yang mana dalam hal ini bisa di fokuskan dalam kajian *fiqh siyāsah dustūriyah* yang mengkaji dan mengatur hubungan diantara lembaga negara dengan warga negara yang satu dan lembaga negara dengan warga negara yang lain dalam batasan administratif warga negara.<sup>6</sup>

Selanjutnya, *fiqh siyāsah dustūriyah* ini dibagi kedalam beberapa bidang di antaranya adalah: Pertama, Bidang *siyāsah tashrī'iyah*, membahas persoalan *ahlu hali wal ‘aqdi*, persoalan perwakilan rakyat; Kedua, Bidang *siyāsah tanfidīyah*, didalamnya membahas tentang *imamah, bai’ah, wizārah, waliȳ al ahdi*, dan lain sebagainya; Ketiga,

<sup>6</sup> Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 48.

Menurut Prof.H.A Djazuli menyebutkan bahwa kelembagaan dalam *fiqh siyāsah dustūriyyah* itu di bagi menjadi dalam beberapa lembaga di antaranya adalah: Pertama, Lembaga *ahl al-hall wa al-‘aqd*; Kedua, Lembaga *imamah* yang di pimpin oleh seorang imam dengan di bantu oleh menteri *tafwidh* (para menteri) dan/ atau menteri *tafwied* (wakil presiden,perdana menteri; Ketiga, Lembaga *aqdiyah*/ peradilan, yang di dalam kepustakaan Islam di kepalai oleh *qadli al-quddat* (Ketua Mahkamah Agung); Ke-empat, Lembaga keuangan atau lebih di kenal dengan *bait al-māl*, dengan perangkat pengawasannya.

Menurut pendapat Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkām As-Shultāniyyah* menyatakan bahwa al-Ḥisbah adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan di tinggalkan (tidak di amalkan), dan

[illegible]



Secara hierarki struktur dan kedudukan *wilāyat al-Hhisbah* berada di bawah lembaga peradilan. *Wilāyat al-Hhisbah* bersama dengan *wilāyatul qadha* dan *wilayātul madzālim* berada dibawah *qādhi al-qudhoh* (Hakim Agung). Ketiga institusi tersebut mempunyai peran yang sama yaitu sebagai lembaga peradilan yang memutuskan sengketa dan memberikan hukuman, tetapi ketiganya mempunyai perbedaan dalam hal cakupan tugas serta kewenangannya. *Wilāyatul Qādha* adalah sebagai lembaga peradilan umum seperti yang kita kenal sekarang ini, *wilāyatul madzālim* adalah lembaga yang dibentuk untuk menangani kesewenang-wenangan dan kedzaliman pejabat pemerintah, sedangkan *wilāyat al-hisbah* adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan amar ma'ruf nahi munkar secara umum.

Agung). Ketiga institusi tersebut mempunyai peran yang s sebagai lembaga peradilan yang memutuskan sengketa dan m hukuman, tetapi ketiganya mempunyai perbedaan dalam ha tugas serta kewenangannya. *Wilāyatul Qādha* adalah sebaga peradilan umum seperti yang kita kenal sekarang ini, *wilāyatul* adalah lembaga yang dibentuk untuk menangani kesewenang- dan kedzaliman pejabat pemerintah, sedangkan *wilāyat al-hisb* lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan syariat amar ma'ruf nahi munkar secara umum.

Lembaga *wilāyah al-hisbah* ini disamping bertugas m aturan yang ada di dalam hukum, juga bertugas menging

<sup>9</sup>Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadha fi al-Islam*, (terj) Imran A.M, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982). Dikutip dalam bukunya Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 113

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebut diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam proposal yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum (Studi Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012)” yaitu:

- [illegible]

4. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam tinjauan *fiqh siyāsah*.

Maka dari itu dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pembatasan oleh Undang-Undang terhadap ruang gerak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam rangka penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang kemudian kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ditinjau berdasarkan tinjauan *fiqh siyāṣah*. Adapun hal lainnya yang berkenaan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diluar pokok pembahasan. Maka hal tersebut tidak termasuk dalam fokus kajian penelitian ini.

### C. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan latar belakang diatas dan pembatasan masalah yang akan dikaji, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik Pemilihan umum dalam Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012)?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik Pemilihan umum dalam putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012)?

1. “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dikaitkan dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Skripsi ini ditulis oleh Supriarjo Silaban pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sistem penyelenggara pemilu di Indonesia, serta menjelaskan tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam menjaga kemandirian, independensi dan integritas penyelenggara Pemilu yang dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, sedangkan dalam skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilihan umum dalam ‘putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012.’

- skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada tinjauan *fiqh* terhadap kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran etik Pemilihan umum dalam putusan DKPP Nomor 23-25/PKE-I/2012.
3. “Pelaksanaan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara (DKPP) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo”. Skripsi ini

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yang ingin dihasilkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- ## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

- ## 1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini secara teoretis diharapkan mampu memberikan sumbangsih memperkaya ilmu pengetahuan yang lebih spesifiknya bagi pengembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang :



- ## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pikiran terkait upaya pembatasan dan optimalisasi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik Pemilihan umum. Dan sebagai masukan/sumbangan bagi DKPP dalam menyusun dan menetapkan kode etik Pemilihan umum. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharap dapat membuka wawasan masyarakat terkait dengan kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilihan Umum ‘menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.’

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak tentu



## 1. Jenis Penelitian

## 2. Sumber Data

<sup>13</sup>Burhan Ash Shofa , *Metode Penelitian Hukum* , cet Ke-1 (Jakarta : Rineka Cipta,1996),103-104.

- Pemilu, dan Putusan DKPP Nomor 23-25/ DKPP-PKE-
- b. Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi yang dengan hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen. Publikasi tentang hukum tersebut dapat meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan kons



Dalam menyusun skripsi ini, penulis membagi kedalam lima bab, dimana dalam tiap-tiap bab akan dibagi dalam subbab-subbab bahasan yang merupakan rangkaian dari bab yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya sistematika sebagai berikut:

**Bab II Kerangka Konseptual**, memuat landasan teori *fiqh siyāsah*, pada bab ini akan diuraikan tentang teori *fiqh siyāsah* meliputi definisi, ruang lingkup, dan seterusnya serta memuat tentang teori kewenangan yang meliputi definisi, sumber kewenangan, dan seterusnya.

**Bab III Data Penelitian**, memuat gambaran umum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelenggara Pemilu yang meliputi landasan hukum pembentukan DKPP, kedudukan hukum DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilu, tugas dan kewenangan DKPP, kode etik penyelenggara pemilu, mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan putusan DKPP, putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012.

**Bab IV Analisis Data**, memuat bab analisis kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelesaian kode etik Pemilihan umum pasca putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012





## TINJAUAN UMUM MENGENAI *WILAYAH AL-HISBA* DALAM *FIQH SIYASAH*

*Fiqh siyāsah* memiliki akar kata yang berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan yang kedua adalah *al-siyāsi*. Secara bahasa *fiqh* berarti faham.. Sedangkan kata *al-siyāsi* secara bahasa berasal dari bentuk masdar yaitu “سأس-يسوس-سياسة” yang memiliki arti mengatur.<sup>14</sup> Kata *fiqh* secara leksikal berarti paham, tahu, dan mengerti merupakan sebuah istilah yang digunakan secara khusus dalam bidang yurisprudensi Islam dan hukum agama.

Secara terminologis atau istilah, menurut pendapat ulam-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* merupakan pengetahuan mengenai hukum-

<sup>15</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ( Jakarta: Rajawali Press, 1994), 21.

Kata *siyāṣah* secara bahasa (etimologis) merupakan bentuk masdar dari *sāsa-yasūsu-* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah”. Kata *sāsa* memiliki persamaan kata dengan kata *dabbara* yang berarti mengatur, memimpin (*to lead*), memerintah (*to govern*), dan kebijakan pemerintah (*policy of government*).

dengan penalaran dan ijtihad oleh para mujtahid. Istilah menyatakan fikih merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.<sup>16</sup>

Kata *siyāsah* secara bahasa (etimologis) merupakan bentuk dari *sāsa-yasūsu-* yang artinya “mengatur, mengurus, memimpin dan memerintah”. Kata *sāsa* memiliki persamaan kata dengan kata *dabbara* yang berarti mengatur, memimpin (*to lead*), memimpin (*govern*), dan kebijakan pemerintah (*policy of government*).

Secara terminologis, kata *siyāsah* di sini terdapat pendapat di kalangan ahli hukum Islam, antara lain: Ibnu Mardawaih bahasa dari Mesir. Menurut beliau *siyāsah* berarti mengatur

<sup>17</sup> Imam Amrusi Jaelani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 7.

Selanjutnya *fiqh siyāsah* menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam* menyebutkan bahwa *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang menjelaskan mengenai urusan dan pengaturan manusia dalam hidup bernegara untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri.<sup>19</sup>

Dengan berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* atau *siyāsah syarʿīyah* merupakan “ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala macam bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Atau dengan istilah lain

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyāsah* menjelaskan tentang sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, bagaimana dasar dan cara-cara menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa penguasa mempertanggungjawabkan kekuasaannya tersebut.<sup>21</sup>

Menurut Imam Al-Mawardi, ruang lingkup *fiqh siyāsah* mencakup kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyāsah dustūriyah*), ekonomi dan moneter (*siyāsah māliyah*), peradilan (*siyāsah qadhā'iyah*), hukum perang (*siyāsah ḥarbiyah*) dan administrasi negara (*siyāsah idāriyah*). Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya ke dalam empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter, serta hubungan internasional. Sementara Abdul Wahab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>22</sup>

<sup>22</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 13.

[illegible]



1. *Siyāsah Dusturiyyah* atau politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum, atau *tasyrī'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadlā'iyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idāriyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
2. *Siyāsah dauliyyah/ Siyasah kharajiyyah* atau politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau *siyasah harbiyyah*, yang mengatur tentang etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawawanan perang, dan gencatan senjata.
3. *Siyāsah māliyyah* atau politik keuangan dan moneter. Bagian ini antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak pajak dan perbankan.

[illegible]

Kata *dustūr* memiliki persamaan dengan kata *constitution* dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Undang-undang dasar. *Siyāsah Dustūriyyah* merupakan bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahas persoalan perundang-undangan negara agar nilai-nilai yang tercermin dalam prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum-hukum syari'at dapat sejalan baik hukum yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun hubungan yang lain yang bermacam-macam<sup>25</sup>

Menurut pendapat J.Suyuthi Pulungan dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyāsah*, ajaran, sejarah dan pemikiran menyebutkan bahwa definisi dari *siyāsah dustūriyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan

[illegible]

Adapun permasalahan didalam *fiqh siyāsah dustūriyyah* adalah persoalan hubungan antara pemimpin dan rakyat serta kelembagaan yang terdapat didalam masyarakat. Apabila kita lihat dari sudut pandang *fiqh siyāsah dustūriyyah* maka dapat di bagi antara lain:<sup>27</sup>

- <sup>26</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ( Jakarta: Rajawali Press, 1994), 40.

[illegible]

#### D. Konsep Peradilan dalam *Siyāṣah Dustūriyyah*

1. Lembaga legislatif (*sultah tashrī'iyah*), lembaga negara ini merupakan lembaga yang memiliki fungsi untuk membuat Undang-undang.
2. Lembaga eksekutif (*sultah tanfīziyyah*), lembaga ini merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai pelaksana Undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif.
3. Lembaga yudikatif (*sultah qadā'iyyah*), lembaga ini merupakan lembaga negara sebagai pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman.

<sup>29</sup> Ibid., 29.

### E. *Wilāyah Al-Ḥisbah*

Secara etimologis, *wilāyah al-hisbah* terdiri dari dua kata, yaitu *wilāyat* dan *hisbah*. Secara harfiah *wilāyat* berarti kekuasaan atau kewenangan, sedangkan *al-hisbah* berarti imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan. Dengan demikian, secara harfiah dapatlah dikatakan bahwa *hisbah* adalah kewenangan melakukan suatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).1939



a. Masa Rasulullah SAW

Pada masa Rasulullah saw, *wilāyat al-hisbah* belum terbentuk menjadi sebuah lembaga, yang ada hanyalah praktek-praktek penegakan *al-Amru bi al-ma'rūf wa nahy an al-munkar* yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Dari sinilah Rasulullah Saw menjadi seorang inisiator dalam lahirnya lembaga *wilāyat hisbah*.<sup>35</sup>

### b. Masa Khulafa'ur Rasyidin

Pada masa Abu Bakar al- Shiddiq, wewenang *hisbah* di pegang langsung oleh khalifah Abu Bakar. Bentuk pelaksanaan *Hisbah* yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar adalah beliau terjun langsung untuk memerangi nabi-nabi palsu, orang yang enggan membayar zakat, serta memerangi orang-orang yang murtad.

<sup>34</sup> Hafas Furqoni. Beberapa Catatan Penting Tentang *Wilayah al-Hisbah* [www.acchstitute.org/opini/25-0407\\_hafas\\_furqoni\\_tentang\\_wh.htm](http://www.acchstitute.org/opini/25-0407_hafas_furqoni_tentang_wh.htm).

<sup>35</sup> Alfian Mushafy Abdullah, “Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern”, (Skrispi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), 32.



Penerapan *hisbah* pada khalifah Utsman adalah beliau bukan langsung terjun untuk melakukan penerapan *hisbah* tersebut. Akan tetapi beliau menugaskan seorang laki-laki dari Bani Lais yang bernama al-Haris Ibn al-Hakkam untuk mengawasi pasar Madinah.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pelaksanaan *hisbah* tetap berada langsung dibawah kendali khalifah. Keberadaan *hisbah* pada masa Ali bin Abi Thalib bisa dilihat dari perbuatan Ali bin Abi Thalib yang menyuruh muhtasib membubarkan tempat-tempat penjualan *khamr*.<sup>36</sup>

### c. Masa Daulah Bani Umayyah

Pada masa daulah Bani Umayyah ini, dalam pelaksanaan tugasnya, Muhtasib tidak lagi dicampuri oleh khalifah. Fungsi khalifah hanyalah menetapkan peraturan pelaksanaannya saja. Keberadaan *wilāyah al-hisbah* pada masa Bani Umayyah ini sudah menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah peradilan dibagi menjadi dua bagian yaitu peradilan syari'ah

<sup>36</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Tarikh Khulafa' al- Rasyidin* (Beirut: Dar al-Fikr, T.th), 67-71

Kewenangan *wilāyat al-hisbah* pada masa Bani Umayyah sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Jalal Syarif dan Ali Abd al- Mu'ty Muhammad, adalah untuk menindak pelanggaran-pelanggaran hukum *syara'* secara segera, mengatur pasar, dan lain sebagainya. Bahkan antara *wilāyah al-hisbah* dan *wilāyah al-qādha* saling berkaitan.<sup>38</sup>

Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, *wilāyah al-hisbah* sudah terlaksana dengan baik. *Wilāyat al-Hisbah* pada masa daulah Bani Abbasiyah sudah menjadi lembaga secara mandiri, sebagaimana lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Secara struktural, *wilāyat al-hisbah* berada di bawah kewenangan *wilāyat al-qādhi*. Dengan begitu, pengangkatan dan pemberhentian Muhtasib juga dilakukan oleh al-qadhi. Daerah kewenangan *wilāyat al-hisbah* adalah di lingkungan pasar untuk mengatur para penjual dan pembeli agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' baik yang terkait jual beli,

<sup>38</sup> Ibid., 42.

Secara garis besar tugas dari lembaga *al-Hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas lembaga *al-Hisbah*. Sedangkan tugas dari al-Muhtasib adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun.<sup>39</sup>

Menurut Al Mawardi, kewenangan *wilāyah al- hisbah* ini meliputi dalam tiga hal : pertama, dakwaan yang berkaitan dengan pengurangan atau kecurangan dalam takaran atau timbangan, kedua : dakwaan yang berkaitan dengan penipuan dalam harga dan komoditi seperti menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa, mengurangi takaran dan timbangan di pasar, ketiga : dakwaan yang berkaitan dengan pembayaran hutang yang ditunda-tunda padahal pihak yang berhutang telah mampu membayarnya.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> T.M Hasbi As-shiddiqey, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra.2001). 96.

[illegible]

diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim diluar hukuman yang ditentukan *syara'*.

Ulama' fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus *al-Hisbah* dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran. Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh al-Muhtasib. Langkah –langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa, ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. Al-muhtasib diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif atau tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.<sup>41</sup>

Secara umum wewenang *wilāyah al-hisbah* dapat dibagi menjadi tiga bagian yang dikaitkan dengan *al-amru bi al-ma'rūf wa nahy an al-munkar*, yaitu:

1. **Pekara-perkara terkait dengan hak-hak Allah SWT**

a. *Al-Amru bi al-ma'rūf*

Memerintahkan kepada perbuatan baik ini meliputi jenis ibadah seperti sholat lima waktu secara berjamaah, shalat Jum'at, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Muhtasib bertanggung jawab untuk memastikan perintah Allah SWT.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> E Ersan. “Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam”. (Skripsi--- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 27.

<sup>42</sup> Ibid., 303.



- b. An-Nahȳ an al-Munkar*

- 1) Hak tetangga, hak ini mencakup seseorang yang berbuat terhadap tetangganya. Walaupun begitu, Muhtasib tidak mengambil tindakan selagi tidak ada pengaduan dari tetangga tersebut.
- 2) Di pusat-pusat perniagaan dan di perindustrian. Terdapat keadaan yang perlu diperhatikan. (1) Kesempurnaan dan kekurangan. Contoh: pengobatan yang dilakukan oleh juru perubatan atau doktor, kerana jika terjadi kecerobohan dalam tugasnya berakibat fatal bagi pasien. (2) Amanah dan khianat. Contoh: pekerjaan tukang jahit yang tidak menepati janji. (3) Kejujuran atau mutu terhadap yang telah dikerjakannya.

- a. *Al-Amru bi al-ma'rūf*

- b. An-Nahȳ an al-Munkar*

<sup>44</sup> Ibid., 319.



Dalam lapangan hukum publik biasa digunakan istilah kewenangan atau wewenangan. Akan tetapi, diantara keduanya memiliki perbedaan. Kewenangan adalah apa yang biasa disebut “kekuasaan formal” yaitu kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Sedangkan wewenang merupakan hak untuk memberikan perintah, dan merupakan satu bagian tertentu dari sebuah kewenangan.

Menurut pendapat Ateng Syafrudin memberikan pengertian mengenai perbedaan kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan merupakan pemberian kekuasaan oleh Undang-undang atau yang biasa disebut dengan kekuasaan formal. Sedangkan wewenang hanya merupakan bagian tertentu dari kewenangan

[illegible]

atau dengan kata lain dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.<sup>46</sup>

Dalam konteks hukum administrasi negara, kewenangan berhubungan dengan asas legalitas, yang mana asas ini dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum utamanya bagi negara hukum yang menganut sistem *ropa continental* dijadikan sebagai salah satu prinsip utama dalam pemerintahan.<sup>47</sup>

Kewenangan yang berdasarkan atas Peraturan perundang-undangan secara teoritik dapat diperoleh dengan tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan oleh (legislatif) pembuat Undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik organ pemerintahan yang sudah ada maupun yang masih baru sekalipun. Legislator yang kompeten dalam memberikan atribusi kewenangan itu dibedakan sebagai berikut:
  - a. *Original legislator*, yang berkedudukan disini adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi ditingkat pusat (konstituante), Undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan Peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah;

<sup>46</sup>Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justici, Edisi IV, 2000, 22.

<sup>47</sup> Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), 89.



### A. Landasan Hukum Pembentukan DKPP

DKPP merupakan lembaga (yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu. Spesifiknya, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan/ laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Lalu Kuku Sekartadi, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan No.74/DKPP-PKE-II/2013)”, Jurnal Ius, No.8, Vol. III, (Agustus, 2015), 402.

Berdirinya lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu bukan merupakan sebuah hal yang baru lagi di Indonesia. Sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu tahun 2009 sudah di kenal lembaga yang bernama Dewan Kehormatan KPU (DK KPU). Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) adalah intitusi *ethics* yang difungsikan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara. Akan tetapi, kewenangannya kuran begitu dominan karena hanya bersifat *ad hoc* sebatas memanggil, meeriksa dan menydikan hingga memberikan rekomendasi kepada KPU.

<sup>51</sup> M. Imam Nasef, “Studi Kritis Mengenai Kewenangan DKPP dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustium, No.3, Vol.21, (Juli, 2014), 386.

DK KPU yang beberapa kali dipimpin oleh Prof. Dr. Jimly Asshidiqie ini menuai cukup banyak prestasi yang cukup memuaskan publik termasuk pemerintah dan DPR juga memberikan apresiasi yang positif. Dari prestasi yang baik dan perfoma kelembagaan KPU yang produktif dimata publik inilah yang kemudian menjadi titik tolak penting lahirnya institusi DKPP.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Jimly Asshidique, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 32

[illegible]

merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu, sehingga masing-masing lembaga harus bersifat tetap dan mandiri.<sup>54</sup>

## B. Kedudukan Hukum DKPP Dalam Penegakan Etika Pemilihan Umum

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang mengatur mengenai keberadaan lembaga penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Pasal 22 E ayat (5) diatas tidak secara tegas menyebutkan mengenai kewenangan pokok Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.<sup>55</sup>

Selanjutnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945 Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menempatkan KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga yang mandiri. Menurut Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehormatan pun harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu. Sehingga, kemandirian penyelenggara Pemilu menjadi nyata dan jelas. Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka menimbulkan konsekuensi bahwa DKPP mempunyai kedudukan yang sejajar dengan KPU dan Bawaslu, sehingga

<sup>54</sup> Ibid.,

<sup>55</sup>Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.





Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP memproses setiap laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih dan rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pengaduan tersebut diadukan oleh pihak-pihak yang menganggap dirugikan oleh penyelenggara Pemilu yang notabene menjabat sebagai anggota KPU, anggota Bawaslu dan jajaran dibawahnya yang diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara



Kata etika bahasa Yunani “*ethos*” yang memiliki arti kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Istilah Etika juga disebut juga dengan “*mores, mos*” yang juga berarti adat istiadat kebiasaan yang baik, sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.<sup>62</sup>

Etika merupakan sebuah elemen penting yang harus ditaati oleh setiap penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU dan Bawaslu beserta jajarannya dari atas sampai bawah, hal ini merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Terwujudnya pemilu yang demokratis dapat tercapai apabila para penyelenggara pemilu mengedepankan nilai-nilai etika. Begitu pula sebaliknya, apabila para penyelenggara Pemilu melanggar nilai-nilai etika, maka akan menghambat terwujudnya Pemilu yang demokratis di Indonesia.<sup>63</sup>

DKPP dalam menyusun dan menetapkan kode etik sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus mengikutsertakan Komisi Pemilihan

<sup>63</sup> M. Lutfi Chakim, “Desain Institusional Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”, Jurnal Konstitusi, No.2, Vol. 11, (Juni, 2014), 402.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak sedikit penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran terhadap kode etik Pemilu dengan melakukan ketidakcermatan sampai dengan keberpihakan kepada peserta Pemilu. Dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa untuk menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu maka penyelenggara pemilu harus berpedoman pada prinsip:

1. Jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan, dan/ atau putusan yang diambil;
3. Adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;

[illegible]

4. Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
5. Berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
6. Aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
7. Tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
8. Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
9. Proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
10. Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban

11. Efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;

13. Kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.<sup>65</sup>

## 1. Pelanggaran formal dan pelanggaran materiil

<sup>65</sup> Pasal 6 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.



yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

2. Pelanggaran yang bersifat *commision* (aktif melakukan) dan pelanggaran yang bersifat *ommision* (melanggar dengan cara tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan)

Jenis pelanggaran kode etik yang bersifat *commision* merujuk kepada suatu perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh penyelenggara Pemilu yang secara nyata dilarang oleh hukum dan kode etik penyelenggara Pemilu. Selanjutnya jenis pelanggaran yang bersifat *ommision* merujuk kepada sikap dan tindakan pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu terhadap suatu keadaan dan perbuatan yang diketahui sebagai pelanggaran hukum Pemilu/ atau pelanggaran kode etik.

3. Pelanggaran yang disengaja (*dolus*) dan pelanggaran karena kelalaian (*culpa*)

Dalam hal ini yang dimaksud pelanggaran *dolus*, yakni suatu perbuatan pelanggaran yang disengaja dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Sementara pelanggaran yang bersifat kelalaian (*culpa*) adalah jenis pelanggaran yang tidak didasarkan pada kehendak untuk

Menurut pendapat anggota sekaligus juru bicara DKPP, Nur Hidayat Sardini dalam bukunya yang berjudul Mekanisme Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu telah membuat kategorisasi pelanggaran yang disebutnya sebagai modus-modus pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, yaitu sebagai berikut:<sup>67</sup>

*Vote manipulation* merupakan pelanggaran etik dengan menambahkan, mengurangi, atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta Pemilu ke peserta Pemilu yang lainnya, perbuatan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu antar satu dengan yang lainnya.

*Bribery of Officials* merupakan pemberian dengan maksud memenuhi kepentingan pemberi kepada penyelenggara Pemilu dan untuk menguntungkan dan/ atau merugikan pihak lain dalam kepesertaan Pemilu, seperti memberikan sejumlah uang atau barang atau melakukan perjanjian khusus dengan penyelenggara Pemilu.

<sup>67</sup> Nur Hidayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: LP2AB (Lembaga Pendidikan Anak Bangsa, 2015)), 174-182







Tahap selanjutnya pelaporan atau pengaduan yang telah disampaikan kepada DKPP terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan materiil. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemeriksaan administrasi, yaitu pemeriksaan terhadap identitas lengkap pengadu, identitas lengkap teradu disertai dengan alasan pengaduan dan permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik. Jika laporan tersebut belum lengkap, maka DKPP wajib memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengaduan atau laporan diterima kepada pengadu dan/ atau pelapor untuk segera melengkapi.<sup>73</sup>

Terhadap pengadu atau pelapor yang pengaduan atau pelaporannya tidak lengkap maka harus diperbaiki dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan dari DKPP. Apabila pelapor

<sup>73</sup> Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 114-117.

Setelah tahap pemeriksaan administrasi dilakukan, dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan materiil yang ditujukan untuk memeriksa apakah laporan atau pengaduan tersebut memenuhi unsur pelanggaran kode etik. Selanjutnya jika pengaduan atau pelaporan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun materiil maka pengaduan tersebut dicatat dalam buku registrasi perkara oleh DKPP dan dilakukan penjadwalan hari sidang.<sup>74</sup>

Adapun acara sidang di DKPP terdiri atas kedudukan hukum pengadu dan/ atau pelapor dan terlapor dan/ atau teradu, dilanjutkan dengan agenda mengemukakan alasan dari pihak pengadu dan/ atau pelapor di bawah sumpah, pembelaan dari pihak teradu dan/ atau terlapor terhadap laporan atau aduan yang dituduhkan kepadanya dan pembuktian.

[illegible]



Terhadap hasil sidang, Majelis hakim menyampaikan berita acara persidangan dalam rapat pleno. Penetapan putusan pelanggaran kode etik oleh DKPP dilakukan dalam rapat pleno paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai sidang pemeriksaan. Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim dapat berupa putusan tidak dapat diterima, putusan ditolak dan putusan diterima.<sup>76</sup>

Keberadaan DKPP sebagai sebuah peradilan etik yang melakukan pemeriksaan dan pemutusan terhadap dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu telah menjadi sebuah sorotan publik. Selain itu, sifat dari pada putusan DKPP juga telah menjadi sebuah sorotan tersendiri bagi para penggiat ketatanegaraan dan para penyelenggara Pemilu.<sup>77</sup>

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Frasa “final” memiliki arti bahwa putusan yang dikeluarkan DKPP memperoleh kekuatan hukum

<sup>77</sup> M. Lutfi Chakim, "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Lembaga Etik", Jurnal Konstitusi, No.2, Vol. , (Juni, 2011), 406.

Hal ini sebagaimana tertuang didalam Pasal 39 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.<sup>79</sup> Frasa putusan final dan mengikat ini mewajibkan KPU dan Bawaslu untuk segera melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan. Walaupun secara konseptual DKPP telah melampaui kewenangan yang dimilikinya.<sup>80</sup>

<sup>80</sup> Muh. Salman Darwis, “Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013”, Jurnal Konstitusi, No.1, Vol. 12, (Maret 2015), 89.

Desain kelembagaan yang diletakkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konsep tiga dalam satu (*tree in one*). Di mana KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan tiga institusi dalam satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu. Dengan adanya tiga lembaga yang diletakkan sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu maka peluang terjadinya sebuah benturan keras juga tidak dapat dipungkiri. Apalagi yang satu akan mengawasi yang lain dalam penyelenggaraan semua tahapan pemilihan umum serta pelaksanaan fungsi yang melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang.<sup>81</sup>

[illegible]

PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai aturan turunan dari Pasal 173 UU Pemilu, menyatakan verifikasi administrasi merupakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Sementara verifikasi faktual merupakan penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek dilapangan dengan dokumen persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Dan yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah KPU.<sup>82</sup>

<sup>82</sup> Melina Agustin, “Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Verifikasi Faktual Partai Politik” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 65.

tahapan Pemilu hal ini di karenakan hal tesebut tidak ada hubungannya dengan kode etik.<sup>83</sup>

Lingkup kewenangan DKPP hanya memeriksa apakah pengaduan tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terbukti atau tidak. DKPP hanya bisa menegur, memberhentikan sementara dan pemberhentian tetap kepada penyelenggara pemilu yang terbukti bersalah, tidak sampai memerintahkan KPU untuk mengikutsertakan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk selanjutnya diberi mengikuti verifikasi faktual.<sup>84</sup>

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KEWENANGAN DKPP DALAM  
PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PEMILIHAN UMUM  
(STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012)**

Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tersebut tidak merujuk kepada satu nama lembaga saja, namun merujuk pada fungsi penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kontruksi berpikir demikian juga telah menjadi tafsir resmi Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 tersebut. Tafsir itulah yang kemudian ditindaklanjuti oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dimana, baik KPU, Bawaslu dan DKPP didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi Pemilu. Dengan demikian, yang dipahami sebagai komisi pemilihan umum sebagaimana terdapat dalam rumusan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan.

Dengan adanya tiga lembaga yang diletakkan sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu, walaupun dengan kewenangan yang berbeda satu dengan yang lain, namun peluang terjadinya benturan cukup besar. Apalagi lembaga yang satu akan mengawasi yang lain dalam penyelenggaraan semua tahapan Pemilu.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa DKPP adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 12 Juni 2012. Keberadaan DKPP dimaksudkan untuk menjaga etika penyelenggara Pemilu. DKPP berdasarkan amanat Pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberi tugas dan wewenang menerima aduan dan/ atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, DKPP berwenang memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP juga diberikan wewenang untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik baik berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian tetap.

Dari serangkaian kewenangan DKPP yang telah dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut. Maka dapat disimpulkan kewenangan dalam hal penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Indonesia yang dimiliki oleh DKPP adalah bersifat atribusi, dimana kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang diberikan pemerintahan oleh pembuat undang-undang



kepada sebuah organ pemerintahan, DKPP memiliki kewenangan yang bersumber dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana undang-undang tersebut merupakan produk dari DPR selaku lembaga legislatif di Indonesia.

Dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang telah berjalan beberapa dekade ini, ada hal menarik yang sering disoroti dimana KPU dan Bawaslu sebagai pemegang kekuasaan dalam Pemilu mengeluhkan sistem kerja DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Singkatnya keluhan tersebut dikarenakan DKPP terkadang melampaui batas kewenangannya dan melahap porsi kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga lain. Tidak hanya itu, DKPP bahkan memiliki kecenderungan menempatkan diri sebagai institusi peradilan Pemilu *superbody* yang dapat menjangkau segala persoalan hukum Pemilu yang terjadi. Secara perundang-undangan, DKPP tidak memiliki kewenangan untuk menilai suatu keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Kewenangan DKPP hanya sebatas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/ atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu serta penyelenggara Pemilu dibawahnya.

Dalam hal ini secara nyata terlihat pada putusan-putusan DKPP baik secara yuridis maupun konseptual telah melampaui wilayah kewenangannya dan masuk dalam sengketa Pemilu, contoh dalam

Putusan DKPP Nomor 23-25/ DKPP- PKE-I/ 2012 yang mana putusan tersebut memerintahkan KPU untuk mengikuskertakan verifikasi faktual 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012 merupakan putusan dengan nomor registrasi perkara 26/DKPP-PKE-I/ 2012 yang diajukan pada tanggal 31 Oktober 2012 dalam perkara nomor 055/I-P/L-DKPP/ 2012 dan diajukan pada tanggal tanggal 29 Oktober 2012 dalam perkara nomor 045/I-P/L-DKPP/ 2012 yang mana perkara ini diajukan oleh Pengadu I yaitu Dr. Muhammad, S.IP., M.Si selaku ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia dan Pengadu II yaitu Said Salahuddin selaku Pegiat Pemilu/ Konsultan Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) yang melakukan pengaduan ke DKPP RI terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang komisioner KPU RI.

Bawaslu mengkualifikasikan temuan adanya dugaan pelanggaran kode etik yakni teradu Ketua dan anggota KPU dalam penundaan pengumuman penelitian administrasi hasil perbaikan partai politik diduga tidak menghargai dan menghormati sesama lembaga, tidak tegas, tidak tertib, tidak prosedur, tidak ada kepastian hukum

Atas isi aduan pengadu dan setelah menjalankan proses persidangan serta mendengarkan keterangan teradu, saksi-saksi serta pihak terkait, pada tanggal 27 November 2012 DKPP akhirnya membacakan putusannya yang pada intinya memutuskan:<sup>85</sup>

- <sup>85</sup> Putusan DKPP Nomor 23-25/ DKPP-PKE-I/2012



PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai aturan turunan dari Pasa;  
173 UU Pemilu, menyatakan verifikasi administrasi merupakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Sementara verifikasi faktual merupakan penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek dilapangan dengan dokumen persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.

[illegible]

menjadi peserta pemilu, seiring dengan itu, verifikasi ditujukan untuk membuktikan apakah organisasi, personalia, pengurus, anggota, administrasi dan keuangan partai betul-betul nyata adanya. Secara substansi, verifikasi ditujukan untuk mendorong partai politik membuktikan tanggung jawabnya sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik rakyat. Karena itu, verifikasi merupakan salah satu tahap krusial dalam penyelenggaraan pemilu.

Mengenai tahap pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu pun juga telah dijelaskan dalam Peraturan KPU, sehingga apabila KPU melaksanakan putusan DKPP maka verifikasi faktual atas 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi maka tidak mempunyai dasar hukum.

Putusan DKPP yang memerintahkan KPU untuk mengikutkan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk ikut serta dalam tahap verifikasi faktual telah melampaui kewenangannya, karena verifikasi partai politik adalah bagian dari tahapan pemilu, sehingga akibat putusan ini DKPP seakan-akan melakukan intervensi kepada KPU dan hal tersebut dapat mengancam independensi KPU sebagai penyelenggara tahapan Pemilu dan hal tersebut sangat berbahaya, karena DKPP memutuskan perkara yang bukan merupakan ranah etik penyelenggara Pemilu, namun sudah masuk dalam sengketa administrasi Pemilu.

Kemudian dikatakan pula bahwa DKPP bersidang hanya untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Selanjutnya, mengenai putusan DKPP terhadap penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik hanya berupa sanksi atau rehabilitasi yang dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap, tidak sampai memerintahkan KPU agar mengikutsertakan verifikasi faktual bagi 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU .

Selanjutnya, apabila kita mengkaji tentang kewenangan yang dimiliki oleh DKPP berdasarkan dengan teori kewenangan, maka kewenangan yang dimiliki DKPP adalah bersifat atribusi, sehingga seharusnya DKPP tidak boleh keluar dari kewenangannya dalam hal menjaga kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun faktanya putusan DKPP tersebut sangat jelas telah menerabas batas fungsi penyelenggaraan Pemilu yang dimilikinya.

Dari putusan tersebut apabila DKPP melampaui batas kewenangannya dalam memutuskan perkara yang berkenaan ranah teknis penyelenggaraan tahapan Pemilu, maka penulis berpendapat bahwa DKPP seolah-olah menjadi lembaga yang memiliki kedudukan yang paling dominan atau mempunyai otoritas yang paling tinggi



Dengan meliha fakta-fakta tersebut, sudah seharusnya DKPP kembali ke khittahnya sebagai institusi yang menjaga kode etik penyelenggara Pemilu. Bukan menjadi sebagai sebuah lembaga yang serba bisa yang dapat mengacaukan tatanan lembaga penyelenggara Pemilu dan sistem peradilan masalah hukum Pemilu. DKPP sebaiknya cukuplah berhenti pada ranah menjatuhkan sanksi bagi komisioner penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik. Sedangkan substansi sengketa Pemilu baik terkait sengketa administrasi atau yang lainnya biarlah Bawaslu dan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyelesaikannya.

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Kewenangan DKPP dalam Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012.

*Fiqh siyāsah* atau *siyasah syar'iyah* merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Atau dengan

Oleh karena itu permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ingin penulis analisis menggunakan tinjauan dari sudut ilmu hukum tata negara dalam konsep negara Islam (*fiqh siyāsah*). Mengingat, bahwa DKPP sebagai sebuah peradilan etik pemilu yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Pemilu. Sehingga dalam hal ini penulis akan mencoba menganalisis menggunakan tinjauan *fiqh siyāsah* (ilmu tata negara dalam

Kekuasaan (sultah) dalam negara islam terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- [illegible]

- Dalam konsep ketatanegaraan Islam, terdapat lembaga peradilan salah satu lembaga yang khusus menangani persoalan-persoalan moral yang bernama *wilayah al-hisbah*. *Wilāyat al-Hisbah* merupakan institusi khusus yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai aspeknya, baik akidah, ibadah, ataupun mu'amalat. Orang yang memegang lembaga ini disebut muhtasib.

*Wilāyat al-hisbah* bertugas mengawasi pelaksanaan syari'at Islam dan *amar ma'rūf nahī munkar* dan mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pun seperti menangani kriminal yang perlu penyelesaian segera, mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum, menyelesaikan masalah-masalah kriminal, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, serta menghukum yang mempermainkan hukum syariat.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang biasa disebut dengan istilah DKPP merupakan lembaga yang dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan/ laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, mengenai penjatuhan sanksi, DKPP dapat memberikan

Apabila direalisasikan dengan keberadaan *wilāyah al-hisbah* maka dapat dikatakan lembaga peradilan etik DKPP ini juga hampir sama, sama-sama memiliki kewenangan dalam hal kasus pelanggaran moral atau etika, namun ada letak perbedaan dan persamaannya dari segi tugas dan kewenangan yang dimilikinya

Sedangkan perbedaan dari *wilāyah al-hisbah* dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu secara lebih khusus dapat dilihat dari segi kewenangan yang dimiliki, apabila *wilāyah al-hisbah* memiliki kewenangan yang lebih luas maka hal tersebut berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, mengingat bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia terbagi kedalam tiga lembaga yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. KPU sebagai penyelenggara tahapan Pemilu, Bawaslu mengawasi pelaksanaan

Terkait dengan kewenangan, DKPP memiliki kewenangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah menerima aduan dan/ atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. DKPP berwenang memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. DKPP juga diberikan wewenang untuk memberikan sanksi bagi penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik baik berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.

[illegible]

Perbedaan yang lainnya adalah dari ruang lingkup kewenangan, ruang lingkup kewenangan dari DKPP adalah hanya melakukan pengawasan dan menjaga etika terbatas para penyelenggara Pemilu saja, jika dibandingkan dengan ruang lingkup kewenangan lembaga *wilāyah al-hisbah*, maka *wilāyah al-hisbah* memiliki ruang lingkup kewenangan yang lebih luas yang mencakup semua persoalan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelanggaran norma-norma agama dan sosial yang berlaku di seluruh kalangan masyarakat.

[illegible]





dengan pengawasan terhadap pelanggaran norma-norma agama dan sosial yang berlaku di seluruh kalangan masyarakat.

Dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu didalam Islam tidak ditemukan referensi mengenai lembaga peradilan etik tentang penyelenggara Pemilu (pengangkatan khalifah), tetapi secara esensi tugas dan kewenangannya yang dimiliki *wilāyah al-hisbah* hampir sama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang terfokus pada persoalan perilaku etika perseorangan.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 82

- [illegible]



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Alfian Mushafy. “Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan Lembaga Pengawasn Perekonomian Modern”, Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Agustin, Melina. “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Verifikasi Faktual Partai Politik”. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. (Dar Al-Fikr) Jakarta:PT Darul Falah, 2006.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Tarikh Khulafa’ al- Rasyidin*. Beirut: Dar al-Fikr, T.th.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- As-Shiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- “Mekanisme Pelanggaran Kode Etik dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Kode Etik”. Jakarta, 31 Januari 2017.
- Ash Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. cet-1, Jakarta : Rineka Cipta,1996.
- Chakim, M. Lutfi “Desain Institusional Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”, *Jurnal Konstitusi*, No.2, Vol. 11, Juni, 2014.
- Dahlan,Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Darwis, Muh. Salman “Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013”, *Jurnal Konstitusi*, No.1, Vol. 12, Maret 2015.

- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Outlook DKPP 2016 Refleksi dan Proyeksi: DKPP RI, 2016..
- Djazuli. *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ersan, E. “Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam”.Skripsi--- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Fadlian, Aryo. “Pengaruh Putusan DKPP Terhadap Hasil Pemilihan Gubernur Lampung 2014”, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, No.4, Vol.10, Oktober-Desember, 2016.
- Furqoni, Hafas. Beberapa Catatan Penting Tentang *Wilayah al-Hisbah* [www.acchsinstitute.org/opini\\_25-0407\\_hafas\\_furqoni\\_tentang\\_wh.htm](http://www.acchsinstitute.org/opini_25-0407_hafas_furqoni_tentang_wh.htm).
- Hendri, William. “Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terhadap Putusan DKPP Nomor: 23-25/DKPP-PKE-I/2012”, *Jurnal Selat*, No.1, Vol.4, Oktober, 2014.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- <http://dkpp.go.id/modus -pelanggaran-kode -etik-penyelenggara-pemilu/>
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jaelani, Imam Amrusi .dkk.. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Kusdarini, Eny. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- M Hadjon. Philipus. *Tentang Wewenang*. Surabaya: Makalah Universitas Airlangga, tt. .
- Madzkur, Muhammad Salam. *Al-Qadha fi al-Islam*, (terj) Imran A.M, (Surabaya: Bina Ilmu,1982). Dikutip dalam bukunya Basiq Djalil, *Peradilan Islam*. Jakarta: AMZAH, 2012.

Djazuli. *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Ersan, E. "Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam".Skripsi--- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Fadlian, Aryo. “Pengaruh Putusan DKPP Terhadap Hasil Pemilihan Gubernur Lampung 2014”, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, No.4, Vol.10, Oktober-Desember, 2016.

Furqoni, Hafas. Beberapa Catatan Penting Tentang *Wilayah al-Hisbah*  
[www.acehinstitute.org/opini/25-0407\\_hafas\\_furqoni\\_tentang\\_wh.htm](http://www.acehinstitute.org/opini/25-0407_hafas_furqoni_tentang_wh.htm).

Hendri, William. “Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terhadap Putusan DKPP Nomor: 23-25/DKPP-PKE-I/2012”, *Jurnal Selat*, No.1, Vol.4, Oktober, 2014.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

<http://dkpp.go.id/modus-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu/>

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Jaelani, Imam Amrusi .dkk.. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.

Kusdarini, Eny. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, 2011.

M Hadjon, Philipus. *Tentang Wewenang*. Surabaya: Makalah Universitas Airlangga, tt. .

Madzkur, Muhammad Salam. Al-Qadha fi al-Islam, (terj) Imran A.M, (Surabaya: Bina Ilmu,1982). Dikutip dalam bukunya Basiq Djalil, Peradilan Islam. Jakarta: AMZAH, 2012.

- Nasef, M. Imam. “Studi Kritis Mengenai Kewenangan DKPP dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No.3, Vol.21, Juli, 2014.
- Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu..
- Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Pulungan, J.Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Putusan DKPP Nomor 23-25/ DKPP-PKE-I/2012
- Rahayu, Susi Dian”. Modus Kelalaian Kerja dalam Proses Pemilu (Sloppy Work of Electroral Process) Oleh Penyelenggara Pemilu” Jurnal Etika dan Pemilu, No.1, Vol.4, Juni, 2018.
- Saleh.,dkk. *Hukum Acara Sidang Etik Penyeleggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Saputro, Kustianto Adi. “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)”,Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Sardini, Nur Hidayat. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: LP2AB (Lembaga Pendidikan Anak Bangsa, 2015.
- Sekartadi, Lalu Kuku. “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Putusan No.74/DKPP-PKE-II/2013)”, Jurnal Ius, No.8, Vol. III, Agustus, 2015.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.



- Sukanto. “Kontekstualisasi Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia Prasepektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Malia*, No.1, Vol.7, Februari, 2016.
- Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho. *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
- Syafrudin, Ateng. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justici*, Edisi IV, 2000.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.